

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DI DESA PASSENO, KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nur Syahrini Syamsuddin¹, Hariyanti Hamid², Muhammad Ikbal³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Email: nursyahrini1209@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi serta pengaruhnya terhadap transparansi pemerintahan di Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi berjumlah 933 orang dengan sampel 90 responden yang dipilih melalui *simple random sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori baik dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap transparansi pemerintahan, dengan persamaan regresi $Y = 17,462 + 0,396X$, nilai t hitung $3,928 > t$ tabel $1,987$, dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai R^2 sebesar $0,149$ menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi sebesar $14,9\%$ terhadap transparansi pemerintahan. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak.

Kata Kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi Pemerintahan, Pemerintahan Desa.

Abstract

The utilization of information technology plays an important role in supporting transparency in village governance. This study aims to analyze the utilization of information technology and its effect on government transparency in Passeno Village, Baranti District, Sidenreng Rappang Regency. This study employed a quantitative approach with a descriptive method. The population consisted of 933 people, with 90 respondents selected through simple random sampling. Data were collected through observation, questionnaires, literature review, and documentation, and analyzed using SPSS through validity and reliability tests, classical assumption tests, and simple linear regression analysis. The results show that information technology utilization was categorized as good and had a positive and significant effect on government transparency, as indicated by the regression equation $Y = 17.462 + 0.396X$, with a t -value of $3.928 > 1.987$ and a significance value of $0.000 < 0.05$. The coefficient of determination (R^2) of 0.149 indicates that information technology utilization contributes 14.9% to government transparency. Thus, the alternative hypothesis (H_a) is accepted, while the null hypothesis (H_0) is rejected.

Keywords: Utilization of Information Technology, Government Transparency, Village Governance.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan tersebut, pemerintah menerapkan *e-government* sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi juga mendukung penyediaan informasi publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan terbuka bagi masyarakat. Ketersediaan informasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi serta terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Atho'illah, 2018).

Perkembangan digitalisasi pemerintahan menjadikan teknologi informasi sebagai instrumen penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa, dituntut untuk mengoptimalkan penerapan teknologi informasi agar penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara akurat, sesuai kebutuhan, dan mudah diakses sebagai bentuk penerapan prinsip *good governance*. Melalui penggunaan sistem informasi dan media digital, pemerintah dapat meningkatkan transparansi serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Paryono & Setyowati, 2020).

Dalam konteks pemerintahan desa, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Melalui pemanfaatan berbagai platform digital, seperti Sistem Informasi Desa (SID), situs web desa, dan media sosial resmi, pemerintah desa dapat menyebarluaskan informasi mengenai program pembangunan, aktivitas pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif. Ketersediaan informasi melalui media digital tersebut meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi dengan lebih mudah serta memperkuat partisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa (Sari, DP, & Nugroho, 2020).

Namun, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai pada tingkat pemerintahan desa. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi pemerintahan masih menghadapi beberapa kendala. Informasi publik yang tersedia melalui media digital desa belum sepenuhnya lengkap dan diperbarui secara berkala, terutama informasi terkait profil desa, kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum memperoleh akses informasi yang optimal mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan transparansi dengan kondisi implementasi di lapangan. Secara konseptual, teknologi informasi dapat menjadi instrumen yang mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kemampuan aparatur desa dalam mengelola sistem informasi, serta ketersediaan sarana pendukung. Rendahnya literasi digital aparatur desa dan keterbatasan pelatihan pengelolaan teknologi informasi dapat menyebabkan penyampaian informasi publik belum berjalan secara optimal (Hakim, 2025).

Konsep *good governance* menempatkan transparansi pemerintahan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini mengharuskan pemerintah memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi publik yang akurat, relevan, dan mudah diperoleh, sehingga masyarakat dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat

mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pengawasan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu unsur yang berperan strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa (Rahmawati et al., 2021)

Penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan terhadap transparansi pemerintahan berbasis teknologi dengan pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan keilmuan Administrasi Publik, khususnya pada kajian mengenai digitalisasi pemerintahan dan transparansi publik. Pada aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Desa Passeno dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi serta menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap transparansi pemerintahan di Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi sebuah sistem yang tersusun atas berbagai komponen, yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, basis data, serta sumber daya manusia yang terhubung dan saling mendukung dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan menyebarkan informasi dalam mendukung aktivitas organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran teknologi informasi tidak terbatas pada pelaksanaan administrasi, tetapi juga menjadi salah satu elemen strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kualitas tata kelola pemerintahan (Waruwu et al., 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari konsep *e-government* mengacu pada optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam mendorong terciptanya tata kelola yang lebih efisien, efektif, dan terbuka, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penerapan teknologi informasi, pemerintah dapat menyediakan informasi publik secara tepat waktu dengan akses yang lebih mudah oleh masyarakat sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka dan akuntabel (Rahmad et al., 2020).

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi didasarkan pada *Information System Success Model* yang dikemukakan oleh DeLone & McLone (1992). Model tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek-aspek penting, seperti kualitas sistem dan kualitas informasi, kemudahan akses, serta manfaat yang diberikan kepada pengguna (Davis, 1989). Berdasarkan model tersebut, pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu:

a. Ketersediaan Informasi (*Information Availability*)

Mengukur sejauh mana sistem informasi mampu memenuhi kebutuhan pengguna melalui penyediaan data dan informasi yang relevan secara lengkap dan mudah diperoleh.

- b. Kualitas Informasi (Information Quality)
Menggambarkan tingkat akurasi, relevansi, kejelasan, serta kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi secara tepat waktu.
- c. Keamanan Sistem (System Security)
Menilai kemampuan sistem dalam memastikan data dan informasi tetap terlindungi dari akses oleh pihak yang tidak berwenang maupun penyalahgunaan.
- d. Aksesibilitas (Accessibility)
Mengukur kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui media teknologi yang tersedia.
- e. Kemudahan Penggunaan (Usability)
Menilai sejauh mana sistem dapat digunakan dengan mudah oleh aparatur maupun masyarakat.
- f. Efisiensi dan Efektivitas Proses (Efficiency and Effectiveness)
Mengukur kemampuan teknologi informasi dalam mempercepat proses administrasi dan mendukung pencapaian tujuan pemerintahan.
- g. Partisipasi dan Interaksi Pengguna (User Participation)
Mengukur kemampuan teknologi informasi dalam memberikan ruang sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa (Rahmawati et al., 2023).

2. Transparansi Pemerintahan

Dalam konsep *good governance*, transparansi pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penerapan transparansi tidak semata-mata diwujudkan melalui ketersediaan informasi publik, di samping itu, juga diwujudkan melalui kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh, memahami, serta menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Trisakti et al., 2021)

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), transparansi merupakan salah satu unsur fundamental dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses sehingga masyarakat dapat mengetahui proses penetapan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya publik (Yalimo, 2025).

Transparansi berarti adanya *visibility* dan *accessibility*, yaitu keadaan di mana tindakan pemerintah dapat dilihat, diketahui, dan dievaluasi oleh publik. Artinya, pemerintah wajib menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi terkait kegiatan dan keputusan yang diambil oleh aparat publik (Rosidah et al., 2023)

Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai anggaran desa, program pembangunan, kegiatan pemerintahan, serta laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu media yang mendukung keterbukaan tersebut karena mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Indikator transparansi pemerintahan yang menjadi acuan dalam penelitian ini berlandaskan pada prinsip keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a. Ketersediaan Informasi Publik
Mengukur sejauh mana pemerintah menyediakan informasi mengenai program, kegiatan, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
- b. Aksesibilitas Informasi
Mengukur kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui berbagai media yang disediakan pemerintah.

- c. Kejelasan dan Keakuratan Informasi
Menilai apakah informasi yang diberikan pemerintah mudah dipahami, benar, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Ketepatan Waktu Penyampaian Informasi
Mengukur sejauh mana pemerintah menyediakan informasi secara berkala dan sesuai waktu yang dibutuhkan masyarakat.
- e. Konsistensi Informasi
Menilai kesesuaian informasi yang diberikan melalui berbagai sumber informasi pemerintah.
- f. Akuntabilitas
Mengukur kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan, dan penggunaan sumber daya publik.
- g. Partisipasi Publik
Mengukur keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Sitepu et al., 2022).

C. METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif guna mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap transparansi pemerintahan di Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik penyebaran kuesioner kepada responden, adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur melalui kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi. Populasi penelitian berjumlah 933 orang yang terdiri dari masyarakat dan perangkat desa, yang melibatkan sebanyak 90 responden sebagai sampel penelitian yang ditentukan. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *probability sampling* yang menerapkan metode *simple random sampling*. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Variabel penelitian terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi (X) yang diukur melalui indikator ketersediaan informasi, kualitas informasi, keamanan sistem, aksesibilitas, kemudahan penggunaan, efektivitas penggunaan teknologi, dan partisipasi pengguna, serta transparansi pemerintahan (Y) yang diukur melalui indikator ketersediaan informasi publik, aksesibilitas informasi, kejelasan dan keakuratan informasi, ketepatan waktu penyampaian informasi, konsistensi informasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Setelah proses pengumpulan data selesai, data diolah dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear sederhana guna menguji hubungan pengaruh antara variabel yang diteliti. Hipotesis penelitian diuji menggunakan uji *t* pada tingkat signifikansi 0,05, sedangkan proses analisis data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak IBM SPSS versi 21.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan pengolahan data penelitian terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi, diperoleh gambaran mengenai tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Passeno yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu ketersediaan informasi, kualitas informasi, keamanan sistem, aksesibilitas informasi, kemudahan penggunaan, efektivitas penggunaan teknologi, dan partisipasi pengguna. Masing-masing indikator menunjukkan tingkat capaian yang berbeda sehingga mencerminkan kondisi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi pemerintahan desa. Adapun rekapitulasi hasil penilaian setiap indikator disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi	Presentase (%)
Ketersediaan Informasi	73,60%
Kualitas Informasi	74,80%
Keamanan Sistem	75,20%
Aksesibilitas	83,60%
Kemudahan Penggunaan	81%
Efisiensi dan Efektivitas Proses	84%
Partisipasi dan Interaksi Pengguna	80%
Jumlah	552,20%
Rata-Rata Persentase = $\frac{552,20}{7} \times 100\% = 78,8\%$	

Hasil pengolahan data secara deskriptif mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Passeno telah terlaksana dengan baik. Temuan tersebut dibuktikan melalui nilai persentase yang mencapai 78,8%, sehingga termasuk dalam kategori “baik” berdasarkan kriteria penilaian yang digunakan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyediaan informasi kepada masyarakat melalui media digital. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu di tingkatkan. Terutama pada pembaruan informasi secara berkala, pengelolaan sistem informasi, serta optimalisasi akses informasi bagi masyarakat sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan lebih efektif.

Tabel 2. Hasil Uji HipotesisCoefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.462	2.811		6.213	.000
Pengaruh pemanfaatan teknologi	.396	.101	.386	3.928	.000

a. Dependent Variable: Transparansi pemerintahan

Pengujian hubungan antarvariabel dilakukan melalui analisis regresi linear sederhana menunjukkan model persamaan $Y = 17,462 + 0,396X$, yang menggambarkan hubungan antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi pemerintahan. Pengujian secara parsial menghasilkan nilai *t hitung* sebesar 3,928, yang lebih besar daripada *t tabel* sebesar 1,987. Di samping itu, hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang nilainya lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa hasil pengujian memenuhi kriteria signifikansi. Hasil analisis memberikan bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan transparansi pemerintahan. Arah koefisien regresi yang bernilai positif mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan searah antara kedua variabel, sehingga peningkatan dalam pemanfaatan teknologi informasi cenderung diikuti oleh meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Passeno.

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.386 ^a	.149	.140	3.414

a. Predictors: (Constant), Pengaruh pemanfaatan teknologi

Pengujian terhadap koefisien determinasi memperoleh nilai *R Square* sebesar 0,149. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu menjelaskan 14,9% perubahan pada transparansi pemerintahan, sedangkan 85,1% sisanya dijelaskan oleh

faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Meskipun kontribusinya tergolong rendah, temuan penelitian membuktikan bahwa penerapan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik yang lebih baik. sebagai salah satu prinsip *good governance*.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh pemanfaatan teknologi informasi. Masih terdapat faktor lain, seperti kompetensi aparatur desa, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, serta Tingkat partisipasi masyarakat yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola teknologi informasi, pembaruan informasi secara berkala, serta penguatan sarana dan prasarana digital agar pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap transparansi pemerintahan di Desa Passeno.

E. KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan tingkat yang tergolong dalam kategori “baik” dengan persentase sebesar 78,8%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi sudah berjalan dengan cukup optimal, baik dari aspek ketersediaan informasi, kualitas informasi, aksesibilitas, maupun penggunaan teknologi dalam mendukung kegiatan pemerintahan desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala terutama dalam pengelolaan dan pembaruan informasi digital agar dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi terbukti berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap transparansi pemerintahan di Desa Passeno. Hasil pengujian menggunakan pengolahan data melalui analisis regresi linear sederhana menunjukkan hasil persamaan $Y = 17,462 + 0,396X$. Pengujian hipotesis secara parsial menghasilkan nilai *t hitung* sebesar 3,928, yang menunjukkan nilai lebih besar dibandingkan *t tabel* sebesar 1,987. Selain itu, tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa Hipotesis Alternatif (H_a) dapat diterima, sementara Hipotesis Nol (H_0) tidak diterima. Analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu menjelaskan 14,9% variasi transparansi pemerintahan. Adapun 85,1% bagian yang belum ter jelaskan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar model analisis yang digunakan

DAFTAR PUSTAKA

- Atho'illah, M. (2018). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 115–128.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Hakim, R. L. (2025). *Challenges of Village Digitalization Implementation in Indonesia : A Literature Review*. 2025, 1–10.
- Paryono, E., & Setyowati, H. (2020). Digitalisasi Pemerintahan dan Transparansi Publik di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Birokrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 55–67.
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Alma, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa : Kompetensi Aparatur , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542.
- Rahmawati, Sari, S., P., D., & Nugroho, A. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(3), 144–158.

- Rosidah, I., Gunardi, Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 137–156.
- Sari, DP, & Nugroho, E. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 77–88.
- Sitepu, A. P., & SE, M. A. (2022). *Transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Azka Pustaka.
- Trisakti, F., Dikeu, A., Berliana, D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). Transparansi dan kepentingan umum. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38.
- Waruwu, H. E. J., Ndraha, A. B., Laia, O., & Peringatan Harefa. (2023). Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Aparat Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)*, 10(3), 2506–2520.
- Yalimo, K. (2025). *Prinsip Good Governance serta Prinsip, Penerapan, dan Tantangan*. https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8259_prinsip-good-governance-serta-prinsip-penerapan-dan-tantangan